



# **Algoritma Represi Tiongkok**

**Rekayasa Terbalik Aplikasi Pengawasan Massal Kepolisian  
Xinjiang**

## Ringkasan

Sejak akhir 2016, pemerintah Tiongkok telah menyeret 13 juta orang etnis Uighur dan Muslim Turk lainnya di Xinjiang ke dalam penahanan massal sewenang-wenang, pemaksaan indoktrinasi politik, pembatasan pergerakan, dan penindasan agama. Perkiraan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa di bawah penindasan yang meningkat ini, hingga satu juta orang ditahan di kamp “pendidikan politik”. “Kampanye Gebuk Keras melawan Terorisme yang Kejam” pemerintah (Kampanye *Strike Hard*, 严厉打击暴力恐怖活动专项行动) telah mengubah Xinjiang menjadi salah satu pusat utama Tiongkok dalam penggunaan teknologi inovatif untuk kontrol sosial.

Laporan ini menghadirkan uraian dan analisis terperinci atas sebuah aplikasi seluler yang digunakan polisi dan petugas lainnya untuk berkomunikasi dengan Platform Operasi Gabungan Terpadu (IJOP, 一体化联合作战平台), salah satu sistem utama yang digunakan otoritas Tiongkok untuk pengawasan massal di Xinjiang. Human Rights Watch yang pertama kali melaporkan soal IJOP pada Februari 2018, mencatat program pengawasan ini mengumpulkan data tentang orang dan memberikan tanda kepada petugas soal siapa saja yang dianggap berpotensi mengancam; beberapa dari mereka diincar untuk lantas ditahan dan dikirim ke kamp pendidikan politik dan fasilitas lainnya. Tetapi dengan “rekayasa terbalik” aplikasi seluler ini, kami sekarang mengetahui secara spesifik beberapa jenis perilaku dan orang-orang yang menjadi sasaran dalam sistem pengawasan massal ini.

Temuan ini punya signifikansi lebih luas, menghadirkan jendela yang belum pernah muncul sebelumnya tentang bagaimana cara kerja sebenarnya dari pengawasan massal di Xinjiang, karena sistem IJOP merupakan pusat ekosistem pemantauan dan kontrol sosial yang lebih besar di wilayah tersebut. Temuan ini juga menjelaskan bagaimana pengawasan massal ini berfungsi di Tiongkok. Meski sistem Xinjiang ini sangat mengganggu, desain dasarnya mirip dengan sistem yang sedang direncanakan dan diterapkan oleh kepolisian di seluruh Tiongkok.

Banyak —mungkin semua— praktik pengawasan massal yang dijelaskan dalam laporan ini tampaknya bertentangan dengan hukum Tiongkok. Praktik-praktik itu melanggar hak-hak privasi yang dijamin secara internasional, asas praduga tidak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan, dan kebebasan berserikat dan bergerak. Dampaknya terhadap hak-hak lain, seperti kebebasan berekspresi dan beragama, sangat mendalam.

Human Rights Watch mendapati bahwa para petugas menggunakan aplikasi IJOP untuk memenuhi tiga fungsi luas: mengumpulkan informasi pribadi, melaporkan kegiatan atau keadaan yang dianggap mencurigakan, dan mendorong penyelidikan terhadap orang-orang yang dianggap bermasalah oleh sistem.

Analisis aplikasi IJOP mengungkapkan bahwa pihak berwenang tengah mengumpulkan sejumlah besar informasi pribadi — mulai dari warna mobil seseorang, juga tinggi badan seseorang hingga ukuran sentimernya — dan memasukkannya ke dalam sistem pusat IJOP, menghubungkan data itu ke nomor kartu identifikasi nasional seseorang. Analisis kami juga menunjukkan bahwa pihak berwenang Xinjiang menganggap banyak bentuk perilaku yang tidak melanggar hukum, dilakukan sehari-hari, tanpa kekerasan — seperti “tidak bersosialisasi dengan tetangga, sering menghindari menggunakan pintu depan” — sebagai perilaku mencurigakan. Aplikasi ini juga memberi label mencurigakan terhadap penggunaan 51 peralatan jaringan, termasuk banyak Jaringan Pribadi Virtual (VPN) dan alat komunikasi terenkripsi, seperti WhatsApp dan Viber.

Aplikasi IJOP menunjukkan bahwa pihak berwenang Tiongkok menganggap kegiatan keagamaan damai tertentu sebagai hal yang mencurigakan, seperti menyumbang ke masjid atau mengajarkan Alquran tanpa izin. Tetapi sebagian besar perilaku lain yang dianggap bermasalah oleh aplikasi ini tidak ada hubungannya dengan etnik dan agama. Temuan kami memberi kesan sistem IJOP mengawasi dan mengumpulkan data semua orang di Xinjiang. Sistem ini melacak pergerakan orang dengan memonitor “lintasan” dan data lokasi ponsel, kartu identitas, dan kendaraan mereka; sistem juga memantau penggunaan listrik dan stasiun pengisian bahan bakar minyak setiap orang di wilayah tersebut. Ini konsisten dengan pernyataan pemerintah daerah Xinjiang yang menekankan bahwa para petugas harus mengumpulkan data IJOP secara “komprehensif” dari “semua orang di setiap rumah tangga.”

Ketika sistem IJOP mendeteksi penyimpangan dari apa yang dianggapnya normal, seperti ketika orang menggunakan telepon yang tidak terdaftar, ketika mereka menggunakan lebih banyak listrik daripada “biasanya,” atau ketika mereka meninggalkan daerah di

mana mereka terdaftar di sana tanpa izin polisi, sistem memberi isyarat “petunjuk mikro” ini kepada pihak berwenang sebagai mencurigakan dan mendorong penyelidikan.

Elemen kunci lain dari IJOP adalah pengawasan hubungan pribadi. Pihak berwenang tampaknya menganggap beberapa hubungan ini secara inheren mencurigakan. Misalnya, aplikasi IJOP menginstruksikan petugas untuk menyelidiki orang-orang yang terkait dengan mereka yang mendapatkan nomor telepon baru atau yang memiliki hubungan dengan asing.

Pihak berwenang telah berusaha untuk membenarkan pengawasan massal di Xinjiang sebagai alat untuk memerangi terorisme. Meski aplikasi ini menginstruksikan petugas untuk memeriksa “terorisme” dan “konten audio-visual yang kejam” saat melakukan pemeriksaan telepon dan perangkat lunak, istilah-istilah ini didefinisikan secara luas di bawah undang-undang Tiongkok. Pengawasan massal ini juga menginstruksikan para petugas untuk mewaspadai “penganut Wahabisme,” sebuah istilah yang mengacu pada bentuk radikal dari kepercayaan Islam, dan “keluarga mereka ... yang meledakkan [alat] dan melakukan aksi bunuh diri.” Tetapi banyak — jika tidak sebagian besar—perilaku yang diawasi secara khusus oleh sistem IJOP tidak punya kaitan yang jelas dengan terorisme atau ekstremisme. Analisis kami terhadap sistem IJOP menunjukkan bahwa pengumpulan informasi untuk melawan terorisme sejati atau kekerasan ekstremis bukanlah tujuan utama sistem tersebut.

Aplikasi ini juga memberi penilaian terhadap kinerja para petugas dalam memenuhi tugas dan menjadi alat bagi pengawas di tingkat yang lebih tinggi ketika memberi tugas, dan mengawasi kinerja petugas di bawahnya. Aplikasi IJOP, sebagian, bertujuan untuk mengontrol petugas pemerintah dan memastikan bahwa mereka secara efisien melaksanakan perintah represif pemerintah.

Dalam menciptakan sistem IJOP, pemerintah Tiongkok telah mendapat manfaat dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menyediakan teknologi bagi mereka. Meski pemerintah Tiongkok memiliki tanggung jawab utama atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang, perusahaan-perusahaan ini juga punya tanggung jawab berdasarkan hukum internasional untuk menghormati hak asasi manusia, menghindari keterlibatan dalam pelanggaran, dan melakukan perbaikan secara layak ketika itu terjadi.

Sebagaimana dirinci di bagian bawah, sistem IJOP dan beberapa pos pemeriksaan wilayah bekerja sama untuk membentuk serangkaian pagar virtual yang tak kasatmata. Pihak berwenang menggambarkan sistem dan pos-pos pemeriksaan itu sebagai serangkaian “filter” atau “saringan” di seluruh wilayah, menyaring elemen-elemen yang tidak diinginkan. Tergantung pada tingkat ancaman yang diterima otoritas—ditentukan oleh faktor-faktor yang diprogram ke dalam sistem IJOP—, kebebasan bergerak individu dibatasi pada derajat yang berbeda-beda. Beberapa ditahan di penjara dan kamp pendidikan politik Xinjiang; selebihnya menjadi sasaran tahanan rumah, tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggal di mana mereka terdaftar, tidak diizinkan memasuki tempat-tempat umum, atau tidak diizinkan meninggalkan Tiongkok.

Kontrol pemerintah atas gerakan di Xinjiang saat ini memiliki kemiripan dengan era Mao Zedong (1949-1976), ketika masyarakat dibatasi harus tinggal di tempat mereka terdaftar dan polisi dapat menahan siapa pun karena berkelana ke luar dari daerah mereka. Setelah liberalisasi ekonomi diluncurkan pada 1979, sebagian besar kontrol ini tidak lagi digunakan. Namun, polisi negara modern Xinjiang—yang menggunakan kombinasi sistem teknologi dan kontrol administratif—memberdayakan pihak berwenang untuk menerapkan kembali tingkat kontrol seperti era Mao, tetapi dengan cara bertingkat yang memenuhi tuntutan ekonomi atas kebebasan bergerak tenaga kerja secara besar-besaran. Pengumpulan informasi pribadi secara besar-besaran dan mengganggu melalui aplikasi IJOP turut menjelaskan laporan yang dibuat oleh Muslim Turk di Xinjiang bahwa petugas pemerintah telah menanyakan mereka atau anggota keluarga mereka serangkaian pertanyaan pribadi yang membingungkan. Ketika agen pemerintah melakukan kunjungan yang mengganggu ke rumah dan kantor warga Muslim, misalnya, mereka biasanya bertanya apakah warga memiliki peralatan olahraga dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan keluarga yang tinggal di luar negeri; tampaknya para petugas tersebut mengisi pertanyaan yang dikirim kepada mereka melalui aplikasi seperti IJOP. Aplikasi IJOP tidak mengharuskan petugas pemerintah untuk memberitahukan orang-orang yang kehidupan sehari-harinya telah ditelaah dan apa tujuan pengumpulan data yang mengganggu tersebut atau bagaimana informasi mereka akan digunakan atau disimpan, apalagi memperoleh persetujuan untuk pengumpulan data tersebut.

Kampanye Gebuk Keras ini telah menunjukkan pengabaian total terhadap hak-hak Muslim Turk atas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Di Xinjiang, pihak berwenang telah menciptakan sistem yang menganggap individu mencurigakan

berdasarkan kriteria yang luas dan meragukan, dan kemudian menghasilkan daftar orang yang akan dievaluasi oleh petugas untuk penahanan. Dokumen resmi menyatakan bahwa individu-individu “yang harus diambil, seharusnya diambil,” menunjukkan tujuannya adalah untuk memaksimalkan jumlah orang yang mereka temukan “tidak bisa dipercaya” dalam tahanan. Orang-orang semacam itu kemudian diinterogasi oleh polisi tanpa perlindungan prosedural mendasar. Mereka tidak memiliki hak ke penasihat hukum dan beberapa menjadi sasaran penyiksaan dan penganiayaan, di mana mereka tidak mendapatkan pemulihan yang efektif, seperti yang telah kami dokumentasikan dalam laporan bulan September 2018. Hasilnya adalah otoritas Tiongkok, dengan dukungan teknologi, secara sewenang-wenang dan tanpa batas menahan Muslim Turk di Xinjiang secara massal atas tindakan dan perilaku yang bukan merupakan kejahatan berdasarkan hukum Tiongkok.

Namun otoritas Tiongkok terus membuat klaim yang sangat tidak akurat bahwa sistem “canggih” mereka membuat Xinjiang aman dengan “mencincar” teroris “dengan akurat.” Di Tiongkok, kurangnya peradilan independen dan pers bebas, ditambah dengan sikap permusuhan yang sengit dari pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil independen, berarti tidak ada cara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atau bisnis yang ikut serta atas tindakan mereka, termasuk konsekuensi yang menghancurkan kehidupan masyarakat yang ditimbulkan oleh sistem ini.

Pemerintah Tiongkok seharusnya segera mematikan IJOP dan menghapus semua data yang telah dikumpulkannya dari orang-orang di Xinjiang. Negara juga seharusnya menghentikan Kampanye Gebuk Keras, termasuk semua program wajib yang bertujuan mengawasi dan mengendalikan Muslim Turk. Semua orang yang ditahan di kamp pendidikan politik seharusnya dibebaskan tanpa syarat dan kamp-kamp ditutup. Pemerintah juga seharusnya menyelidiki Sekretaris Partai Chen Quanguo dan pejabat senior lain yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk melanggar hak privasi, dan memberikan akses ke Xinjiang, seperti yang diminta oleh Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia dan para pakar hak asasi manusia PBB.

Pemerintah asing yang berkepentingan seharusnya mengenakan sanksi yang ditargetkan, seperti Undang-Undang Magnitsky Global di Amerika Serikat, termasuk larangan visa dan pembekuan aset, terhadap Sekretaris Partai Chen dan pejabat senior lainnya yang terkait

dengan pelanggaran dalam Kampanye Gebuk Keras. Mereka juga seharusnya memberlakukan mekanisme kontrol ekspor yang tepat untuk mencegah pemerintah Tiongkok memperoleh teknologi yang digunakan untuk melanggar hak-hak dasar.

## Sejumlah Rekomendasi

### Untuk Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok:

- Mematikan Platform Operasi Gabungan Terpadu (IJOP) di Xinjiang dan menghapus semua data yang telah dikumpulkan;
- Menghentikan pengumpulan dan penggunaan biometrik di Xinjiang sampai ada undang-undang nasional yang komprehensif serta melindungi privasi masyarakat;
- Menghentikan segera “Kampanye Gebuk Keras Melawan Terorisme yang Kejam” (Kampanye *Strike Hard*) di Xinjiang, termasuk semua program wajib yang bertujuan mengawasi dan mengendalikan Muslim Turk;
- Tanpa memihak menyelidiki Sekretaris Partai Chen Quanguo dan pejabat senior lain yang terlibat dalam dugaan praktik pengawasan massal kejam, serta terkait dengan Kampanye Gebuk Keras, dan secara tepat meminta pertanggungjawaban mereka; dan
- Memberikan akses ke Xinjiang, seperti yang diminta oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan beberapa prosedur khusus PBB.

### Untuk Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional:

- Merancang dan mengadopsi undang-undang yang relevan dengan data biometrik dan pribadi untuk memastikan pengumpulannya sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional:
  - Standar yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut seharusnya jadi bagian dari kerangka hukum yang lebih besar untuk memastikan bahwa setiap pengumpulan, penggunaan, akses, penyebaran, dan penyimpanan data semacam itu diperlukan; bahwa langkah-langkah yang kurang mengganggu tidak tersedia; dan bahwa pengumpulan dan penggunaan data semacam itu dirancang secara sempit dan proporsional dengan tujuan yang sah, seperti keselamatan publik.
  - Untuk memastikan agar standar ini ditegakkan, program data biometrik apa pun harus mencakup: otorisasi independen untuk pengumpulan dan



penggunaan data, pemberitahuan publik bahwa pihak berwenang mengumpulkan data, cara pengawasan independen terhadap program, dan jalan bagi orang-orang untuk menentang pelanggaran dan mendapatkan pemulihan.

- Komite Tetap juga seharusnya memastikan pihak berwenang yang relevan mempublikasikan informasi tentang pengumpulan dan penggunaan teknologi pengenalan berbasis biometrik, termasuk tentang basis data yang telah dibuat dan bagaimana semua itu digunakan.

### **Untuk Pemerintah yang Berkepentingan:**

- Menerapkan sanksi yang ditargetkan, seperti UU Magnitsky Global Amerika Serikat dan protokol lainnya, termasuk larangan visa dan pembekuan aset, terhadap Sekretaris Partai Chen Quanguo, dan pejabat senior lainnya yang terkait dengan pelanggaran dalam Kampanye Gebuk Keras;
- Menerapkan mekanisme kontrol ekspor yang tepat untuk menolak memberi akses bagi pemerintah Tiongkok — dan perusahaan Tiongkok yang memungkinkan pelanggaran pemerintah — atas teknologi yang digunakan untuk melanggar hak-hak dasar, termasuk dengan menambahkan CETC dan lainnya yang disebutkan dalam laporan ini ke daftar kontrol ekspor yang ada;
- Memastikan agar lembaga yang dikelola negara, termasuk universitas, tidak terlibat dengan kepolisian Xinjiang dan perusahaan teknologi Tiongkok yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Turk di Xinjiang; dan
- Mendorong misi pencarian fakta internasional untuk menilai situasi di Xinjiang dan melapor ke Dewan HAM PBB.

### **Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa:**

- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan pejabat senior PBB lainnya harus menyampaikan keprihatinannya secara terbuka dan tertutup kepada pemerintah

- Tiongkok tentang pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dari Kampanye Gebuk Keras;
- Pejabat senior PBB seharusnya bertindak untuk memastikan aktivis masyarakat sipil dapat dengan aman melaporkan pelanggaran yang dilakukan pemerintah Tiongkok di Xinjiang dan di tempat lain ke mekanisme HAM PBB; dan
  - Pejabat senior PBB seharusnya mendukung kelompok masyarakat sipil Tiongkok dengan menentang upaya pemerintah Tiongkok di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial di PBB (DESA) untuk memblokir akreditasi kelompok-kelompok yang mengadvokasi hak-hak Muslim Turk di Xinjiang.

### **Untuk Perusahaan Tiongkok dan Internasional yang Beroperasi di Xinjiang, termasuk CETC, HBFEC, Baidu, Face ++, dan Hikvision:**

- Memastikan agar operasi bisnis tidak mendukung Kampanye Gebuk Keras, khususnya, pengawasan massal dan sistem profil biometrik yang dijalankan oleh Biro Keamanan Publik Xinjiang;
- Memastikan agar pengaturan bisnis dengan polisi Xinjiang atau pasukan keamanan lainnya tidak berkontribusi terhadap pelanggaran dan segera bertindak untuk mengakhiri hubungan seperti itu ketika ada bukti bahwa mereka melakukannya;
- Mengadopsi kebijakan eksplisit dalam mendukung hak asasi manusia dan menetapkan prosedur untuk memastikan operasi perusahaan tidak mengakibatkan, atau berkontribusi pada, pelanggaran hak asasi manusia; dan
- Menganalisis dampak hak asasi manusia dari usulan investasi atau operasi dan menerapkan strategi untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif. “Penilaian dampak hak asasi manusia” harus dilakukan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat sipil dan pakar hak asasi manusia.